

Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Pemetaan Wilayah Rawan Konflik di Lampung Tengah

(Strengthening the Capacity of Apparatus in Mapping Conflict-Prone Areas in Central Lampung)

Simon Sumanjoyo Hutagalung^{1*}, Dedy Hermawan²

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}

simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id^{1*}, dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id²



Riwayat Artikel:

Diterima pada 3 Maret 2025

Revisi 1 pada 10 Maret 2025

Revisi 2 pada 9 April 2025

Revisi 3 pada 14 Mei 2025

Disetujui pada 16 Mei 2025

Abstract

Purpose: Central Lampung Regency faces complex social challenges due to land disputes, ethnic differences, and economic inequality, which increase the risk of social conflicts. The limited capacity of local government officials to identify and map conflict-prone areas is a major obstacle to mitigation efforts. This study aims to enhance the capacity of local government officials in social conflict mapping to support evidence-based, preventive policies.

Methodology: Social conflict mapping training was conducted in three phases: preparation, implementation, and evaluation. Participants from various Regional Apparatus Organizations (OPD) were trained in conflict theory, mapping techniques, and data utilization for decision making. The effectiveness of the training was evaluated using pre-tests, post-tests, and feedback questionnaires.

Results: The training significantly improved the participants' understanding and skills, with the average pre-test score of 60 increasing to 85 in the post-test. Feedback questionnaires indicated a high appreciation for the relevance of the materials and interactive learning methods. The participants successfully identified areas with high conflict potential and formulated mitigation strategies based on mapping.

Conclusion: Training in Central Lampung effectively improved conflict mapping skills, with increased scores and calls for more practical sessions and sustained support for the trained individuals.

Limitations: The training was limited by its relatively short duration and constraints in GIS practice facilities. In addition, the long-term effectiveness of this training has not been comprehensively measured.

Contribution: This study contributes to improving the capacity of local government officials in social conflict mapping and provides recommendations for future training.

Keywords: *Conflict Mapping, Conflict Mitigation, Government Official Training, Social Conflict.*

How to cite: Hutagalung, S. S., Hermawan, D. (2025). Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Pemetaan Wilayah Rawan Konflik di Lampung Tengah. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 227-236.

1. Pendahuluan

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks di Provinsi Lampung (Musaffah & Maharani, 2024; Mustofa, 2018). Keberagaman latar belakang masyarakat, baik secara etnis, sosial, budaya, maupun ekonomi, menjadi ciri khas daerah ini. Namun, di balik keberagaman tersebut tersimpan potensi konflik sosial yang cukup tinggi. Berbagai perbedaan kepentingan dan kurangnya mekanisme komunikasi yang inklusif sering kali memicu

gesekan antarkelompok masyarakat. Beberapa konflik bahkan berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak pada stabilitas keamanan dan menghambat proses pembangunan di tingkat local (Musaffah & Maharani, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kecamatan di Lampung Tengah mengalami ketegangan sosial yang dipicu oleh beragam persoalan struktural. Pertama, sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan menjadi salah satu penyebab utama konflik di wilayah ini. Masalah kepemilikan tanah yang belum terselesaikan secara adil menimbulkan ketidakpuasan yang meluas, dan dalam beberapa kasus berkembang menjadi benturan fisik (Putra dkk., 2021; Sadewo dkk., 2014). Kedua, perbedaan etnis, terutama antara kelompok masyarakat pendatang seperti Jawa dengan masyarakat asli Lampung, juga kerap memunculkan ketegangan. Di beberapa desa, seperti Bandar Agung, perbedaan nilai budaya dan pola komunikasi telah menciptakan sekat-sekat sosial yang memperlemah kohesi sosial (Mediawati, 2019; Suhairi dkk., 2020). Ketiga, ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di kawasan ini turut menjadi pemicu konflik. Ketidakadilan dalam distribusi akses terhadap sumber daya dan layanan publik melahirkan kecemburuan sosial yang berpotensi memicu protes atau tindakan destruktif (Alawiyah, 2020; Moniyana & Pratama, 2021).

Dalam konteks ini, aparat pemerintah daerah, khususnya yang tergabung dalam berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki peran strategis dalam mengelola dinamika sosial dan mencegah terjadinya konflik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam deteksi dini, pencegahan, penanganan, dan pemulihan pascakonflik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aparat pemerintah yang belum memiliki kapasitas teknis dan analitis yang memadai untuk menjalankan peran ini secara efektif. Keterbatasan dalam hal keterampilan pemetaan wilayah rawan konflik, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta komunikasi lintas budaya menjadi hambatan yang signifikan (Raja, 2019; Sintaresmi dkk., 2022; Sr, 2019).

Merespons tantangan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi hadir untuk berkontribusi dalam penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Melalui program pelatihan dan pendampingan teknis, kegiatan ini bertujuan untuk membekali para aparat dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam pemetaan konflik sosial. Fokus utama pelatihan ini mencakup identifikasi wilayah rawan konflik, teknik dasar pemetaan sosial berbasis data, serta integrasi pendekatan partisipatif dalam upaya mitigasi konflik. Salah satu inovasi dalam kegiatan ini adalah penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam pemetaan konflik, agar para peserta mampu melihat pola kerawanan secara spasial dan membuat keputusan berbasis bukti. Kegiatan pengabdian ini juga dirancang dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam diskusi, studi kasus, dan simulasi pemetaan konflik berdasarkan data lokal. Selain pelatihan, kegiatan ini juga memberikan sesi konsultasi teknis untuk mendampingi peserta dalam menyusun rencana tindak lanjut di instansi masing-masing.

Dengan demikian, output dari kegiatan tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan langsung dalam tugas sehari-hari. Kegiatan ini menjadi upaya konkret untuk memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial. Harapannya, dengan meningkatnya kapasitas dan kesadaran aparat, pemerintah daerah dapat lebih sigap, terukur, dan responsif dalam menangani potensi konflik yang ada. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan koordinasi antar-OPD yang baik, upaya pencegahan konflik di Lampung Tengah dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan demi terwujudnya ketenteraman sosial dan pembangunan daerah yang inklusif.

Berdasarkan situasi di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam kegiatan ini: (1). Bagaimana meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi konflik sosial?, dan (2). Bagaimana memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan konflik sosial?. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah: (1). Memberikan pelatihan teknis kepada aparat pemerintah daerah mengenai cara mengidentifikasi dan memetakan daerah

dengan potensi konflik sosial, dan (2). Mengintegrasikan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan konflik social.

Kegiatan ini didasarkan dari teori konflik Coser (1956), bahwa konflik dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan dapat berfungsi sebagai sarana penyesuaian sistem sosial. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi destruktif (Azisi, 2021; Sumartono, 2019; Zuldin, 2019). Dalam konteks ini, kemampuan mendeteksi dan memetakan potensi konflik menjadi bagian penting dalam proses adaptif sosial. Sementara itu, Dahrendorf menekankan bahwa konflik muncul akibat ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya, yang menegaskan pentingnya respons pemerintah terhadap isu ketimpangan dan keadilan (Nugroho, 2021; Pratiwi dkk., 2022). Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dihipotesiskan bahwa pelatihan pemetaan konflik sosial dapat memperkuat pemahaman konseptual aparatur pemerintah daerah terhadap dinamika konflik dan wilayah rawan. Selain itu, penggunaan pendekatan berbasis data dan teknologi diyakini mampu meningkatkan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko konflik secara spasial. Hal ini diharapkan tercermin melalui keterlibatan aktif peserta, refleksi kritis, serta rencana tindak lanjut yang kontekstual di wilayah tugas masing-masing.

2. Metodologi

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan mengelola konflik sosial merupakan langkah krusial dalam upaya mitigasi konflik. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan analisis spasial dan pemetaan daerah rawan konflik guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan tiga tahap sebagai berikut: Pertama, tahap persiapan kegiatan. Tahap awal dalam penyelenggaraan kegiatan adalah identifikasi peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Tengah. Peserta yang dipilih meliputi aparatur yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan social (Riwukore, 2022). Keterlibatan lintas sektor ini penting agar pelatihan dapat menghasilkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya pencegahan konflik. Selanjutnya, dilakukan **penyusunan modul pelatihan**, yang mencakup teori dasar konflik sosial, teknik pemetaan konflik, serta analisis kebijakan berbasis data. Modul ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan aplikatif dalam tugas sehari-hari peserta.

Kedua, Pelaksanaan Pelatihan yang terdiri dari beberapa sesi utama, yaitu sesi ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Sesi Ceramah dan tanya jawab bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konflik sosial, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap stabilitas daerah. Materi mencakup teori konflik, contoh kasus di daerah lain, serta prinsip-prinsip dalam pemetaan konflik. Dengan pemahaman ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi potensi konflik sejak dini dan memahami bagaimana pemetaan dapat membantu dalam perencanaan strategi pencegahan. Sementara pada sesi diskusi kelompok sebagai bagian dari penguatan pemahaman, peserta akan menganalisis kasus konflik sosial di Kabupaten Lampung Tengah. Mereka akan memanfaatkan data yang telah dipelajari untuk mengidentifikasi faktor pemicu konflik dan merumuskan strategi pencegahan berbasis pemetaan. Diskusi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan analisis peserta, tetapi juga mendorong kerja sama antar-OPD dalam memahami dan mengatasi potensi konflik di daerah mereka.

Ketiga, tahap evaluasi pelatihan. Setelah sesi teori dan praktik selesai, dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelatihan. Evaluasi ini dilakukan melalui pre-test dan post-test, yang mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (Fatimah & Nurhadi, 2025; Widiya dkk., 2021). Selain itu, peserta akan diminta untuk memberikan umpan balik mengenai materi dan metode pelatihan guna penyempurnaan program di masa mendatang (Dwinarko dkk., 2021; Widiya dkk., 2021). Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi perbaikan modul dan metode pelatihan selanjutnya, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan aparatur di lapangan (Rahmanurwahidah & Nurhadi, 2024). Dengan pelatihan yang terstruktur dan berbasis data, diharapkan aparatur OPD di Kabupaten Lampung Tengah mampu menerapkan pemetaan konflik secara efektif, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan berkontribusi dalam upaya pencegahan konflik sosial di wilayah mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pemetaan konflik sosial ini diawali dengan sesi pembukaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial dari Balitbangda Lampung Tengah. Dalam sambutannya, beliau menekankan urgensi dari kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola potensi konflik sosial. Beliau juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki berbagai dinamika sosial yang dapat memicu ketegangan, seperti sengketa lahan, perbedaan etnis, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemetaan konflik berbasis data spasial menjadi alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Kepala Bidang Sosial juga menegaskan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencegahan konflik. Acara pembukaan ini juga dihadiri oleh 50 aparatur pemerintah daerah yang berasal dari 10 OPD berbeda, termasuk dinas yang menangani urusan sosial, keamanan, perencanaan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi di bidang pemetaan konflik sosial. Pada sesi ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar konflik sosial, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap stabilitas daerah. Narasumber menjelaskan berbagai teori konflik, termasuk perspektif struktural dan budaya yang sering menjadi pemicu konflik di masyarakat. Peserta juga diajak untuk memahami bagaimana pemetaan konflik dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola konflik sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif.

Materi yang disampaikan mengutarakan bahwa pemetaan konflik merupakan pendekatan strategis dalam studi konflik sosial yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta wilayah yang rentan terhadap konflik. Pemetaan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika konflik di suatu daerah, memungkinkan pengambil kebijakan untuk memahami pola-pola konflik dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif (Pauzi & Said, 2022; Sumaya, 2020; Susetyo dkk., 2022). Berikut disajikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dengan Peserta Dari Beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lampung Tengah

Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan mengembangkan kebijakan berbasis bukti empiris. Konflik sosial sendiri dapat dipicu oleh berbagai faktor struktural, seperti ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok tertentu, dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat rentan (Bercovitch, 2019; Fonseca dkk., 2019; Leonardi, 2024). Selain itu, faktor budaya dan identitas, termasuk perbedaan etnis, agama, serta sejarah konflik antar kelompok, juga menjadi pemicu utama dalam berbagai kasus konflik sosial (Avruch, 2022; Martin & Côté, 2019; Schlee, 2008). Oleh karena itu, pemetaan konflik menjadi krusial dalam mengantisipasi dan meredam potensi ketegangan sosial sebelum terjadi eskalasi yang lebih luas.

Dalam konteks teknologi, pemanfaatan Geographical Information System (GIS) semakin berperan penting dalam memvisualisasikan data spasial terkait konflik. Jones et al. (2020) menunjukkan bahwa

GIS dapat membantu mengidentifikasi daerah rawan konflik dengan mengintegrasikan berbagai variabel seperti kepadatan penduduk, distribusi ekonomi, serta faktor sosial lainnya (Jones dkk., 2020). Dengan pemanfaatan GIS, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap potensi konflik. Selain itu, teknologi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan kebijakan terkait mitigasi konflik (Izzudin dkk., 2022; Priambodo dkk., 2023).

Namun, keberhasilan pemetaan konflik dan implementasi strategi pencegahan sangat bergantung pada kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam memahami serta memanfaatkan metode ini (Rusdi, 2021; Suherman & Sirajuddin, 2018). Keterlibatan pemerintah daerah dalam pencegahan konflik sosial harus didukung oleh peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi yang sistematis (Lubis dkk., 2024). Studi tersebut menemukan bahwa program pelatihan yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis mampu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial. Tanpa peningkatan kapasitas ini, pemetaan konflik dan teknologi pendukungnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga kebijakan yang dihasilkan berisiko kurang efektif dalam mengatasi akar masalah konflik. Selain aspek teknis, pelatihan bagi aparatur pemerintah juga harus mencakup pendekatan berbasis komunikasi, mediasi, dan resolusi konflik. Dalam banyak kasus, konflik sosial diperburuk oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak (Andriyani dkk., 2021; Mahpudz, 2023). Oleh karena itu, program pelatihan harus bersifat multidisipliner, menggabungkan teknologi, kebijakan publik, serta keterampilan sosial yang diperlukan dalam interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan pencegahan konflik juga bergantung pada koordinasi antarinstansi. Salah satu kendala terbesar dalam mitigasi konflik sosial adalah koordinasi yang lemah antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil (Jaya & Delmiati, 2022; Nugraha dkk., 2024). Studi tersebut menegaskan bahwa sinergi antara berbagai pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam membangun strategi mitigasi konflik yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemetaan konflik merupakan langkah strategis dalam memahami dan mengantisipasi konflik sosial. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi GIS, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi menjadi faktor utama dalam menciptakan kebijakan yang efektif dalam pencegahan konflik sosial.

Setelah sesi penyampaian materi, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan analisis kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam diskusi ini, peserta berdiskusi untuk: (a). Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami konflik berdasarkan data yang tersedia, (b). Menganalisis faktor penyebab konflik di wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya, dan (c). Merumuskan strategi pencegahan berbasis pemetaan **konflik** yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Diskusi berlangsung secara interaktif, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka. Beberapa wilayah yang diidentifikasi sebagai daerah rawan konflik antara lain adalah kecamatan dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi serta daerah yang memiliki riwayat sengketa lahan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman terkait tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola konflik di wilayah masing-masing. Hasil diskusi ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data.

Sebagai tahap akhir dari pelatihan, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan serta sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan. Evaluasi ini dilakukan melalui: (a). Pre-test dan **post-test**, untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan terkait konsep konflik sosial dan pemetaan konflik, (b). Kuesioner umpan balik, di mana peserta diminta memberikan penilaian terhadap materi, metode pelatihan, serta efektivitas narasumber dalam menyampaikan materi. Secara umum, umpan balik dari peserta menunjukkan apresiasi terhadap metode pembelajaran yang interaktif serta relevansi materi dengan tantangan di lapangan, dan (c). Diskusi akhir, di mana peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan rekomendasi untuk

peningkatan pelatihan serupa di masa mendatang. Beberapa peserta menyarankan agar pelatihan diperpanjang dengan sesi praktik yang lebih intensif guna meningkatkan keterampilan teknis dalam pemetaan konflik.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Rata-rata skor pre-test peserta adalah 60, sedangkan skor post-test meningkat menjadi 85. Berikut adalah tabel perbandingan hasil pre-test dan post-test peserta pelatihan:

Tabel 1. Perbandingan Hasil pre-test dan post-test Peserta Kegiatan

Aspek Penilaian	Rata-rata Skor Pre-test	Rata-rata Skor Post-test	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep konflik sosial	62	86	38.7%
Identifikasi faktor penyebab konflik	58	84	44.8%
Pemanfaatan data untuk pemetaan konflik	60	85	41.7%
Analisis wilayah rawan konflik	61	87	42.6%
Rata-rata Keseluruhan	60	85	41.7%

Tabel ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan, dengan rata-rata peningkatan skor sebesar 41.7%. Hal ini menandakan bahwa pelatihan yang diberikan efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pemetaan konflik sosial. Sementara itu, berikut adalah hasil rekapitulasi kuesioner umpan balik dari peserta pelatihan:

Tabel 2. Rekapitulasi Kuesioner Umpan Balik Peserta Pelatihan

Aspek Penilaian	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Cukup (%)	Kurang (%)	Rata-rata Skor (Skala 1-5)
Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta	55%	40%	5%	0%	4.5
Metode pembelajaran yang digunakan	60%	35%	5%	0%	4.6
Kejelasan penyampaian oleh narasumber	58%	38%	4%	0%	4.5
Keterlibatan peserta dalam diskusi dan praktik	52%	42%	6%	0%	4.5
Relevansi materi dengan tantangan di lapangan	57%	39%	4%	0%	4.5
Manfaat pelatihan dalam meningkatkan keterampilan	59%	37%	4%	0%	4.6
Rata-rata Keseluruhan	57%	38.5%	4.6%	0%	4.53

Dari hasil kuesioner ini, terlihat bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian "Sangat Baik" dan "Baik" terhadap materi pelatihan, metode pembelajaran, serta efektivitas narasumber. Tidak ada peserta yang memberikan penilaian "Kurang", yang menunjukkan bahwa pelatihan ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pada evaluasi diskusi akhir diperoleh hasil rekapitulasi saran dan rekomendasi peserta dalam diskusi akhir:

Tabel 3. Rekapitulasi Saran dan Rekomendasi Peserta Diskusi Akhir

Kategori Saran & Rekomendasi	Uraian Rekomendasi
Perpanjangan durasi pelatihan	Menambah waktu pelatihan agar materi dapat dipelajari lebih mendalam.

Sesi praktik yang lebih intensif	Memberikan lebih banyak latihan langsung dalam penggunaan teknologi GIS.
Pendampingan pascapelatihan	Mengadakan sesi konsultasi atau bimbingan teknis setelah pelatihan selesai.
Peningkatan kualitas materi dan studi kasus	Menggunakan contoh kasus yang lebih relevan dengan kondisi lokal.
Pelibatan lebih banyak OPD	Mengundang lebih banyak instansi agar koordinasi lintas sektor lebih optimal.
Pengadaan perangkat teknologi tambahan	Menyediakan peralatan pendukung seperti komputer dan perangkat lunak GIS untuk latihan langsung.

Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar peserta mengusulkan perpanjangan durasi pelatihan serta peningkatan sesi praktik guna memperkuat keterampilan teknis dalam pemetaan konflik. Selain itu, terdapat rekomendasi terkait pendampingan pascapelatihan serta peningkatan kualitas materi agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, peserta juga berhasil memetakan lima kecamatan yang memiliki potensi konflik sosial tinggi berdasarkan data yang disediakan selama pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari para peserta. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai konflik sosial, diharapkan aparat pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam mendeteksi serta mengelola potensi konflik di wilayahnya. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, pemerintah daerah berencana untuk memperkuat kerjasama antar-OPD, serta menyusun program pelatihan lanjutan agar keterampilan yang telah diperoleh dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan secara optimal dalam kebijakan pencegahan konflik sosial.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pemetaan konflik sosial bagi aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep konflik sosial, pemetaan wilayah rawan konflik, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi konflik. Dari hasil pre-test dan post-test, skor rata-rata peserta meningkat dari 60 menjadi 85, dengan rata-rata peningkatan sebesar 41,7%. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan, termasuk ceramah, diskusi kelompok, serta sesi interaktif, telah berhasil meningkatkan kapasitas peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab konflik di daerah mereka. Selain itu, hasil kuesioner umpan balik menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan apresiasi terhadap relevansi materi, efektivitas metode pelatihan, serta keterampilan narasumber dalam menyampaikan materi. Tidak ada peserta yang memberikan penilaian "Kurang", yang menandakan bahwa pelatihan ini telah memenuhi kebutuhan peserta dalam meningkatkan kompetensi mereka terkait pemetaan konflik sosial. Dalam diskusi akhir, peserta menyampaikan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelatihan serupa di masa depan. Salah satu usulan utama adalah perpanjangan durasi pelatihan agar materi dapat dipelajari lebih mendalam dan diterapkan secara optimal. Selain itu, peserta menekankan pentingnya peningkatan sesi praktik, terutama dalam penggunaan teknologi GIS untuk pemetaan konflik, guna memperkuat keterampilan analisis data spasial.

Pelatihan pemetaan konflik sosial ini telah meningkatkan kapasitas aparat, namun masih terdapat keterbatasan, seperti belum adanya pendampingan pascapelatihan, materi yang kurang kontekstual, dan keterlibatan OPD yang belum menyeluruh. Untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan pelatihan lanjutan yang lebih praktis, pendampingan teknis rutin, serta studi lanjutan tentang efektivitas pelatihan jangka panjang. Disarankan juga peningkatan koordinasi antar-OPD dan penerapan monitoring-evaluasi berkala guna memastikan pemetaan konflik diterapkan secara konsisten dan efektif.

Ucapan terima kasih

Terima Kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah atas kesempatannya untuk melaksanakan pelatihan, serta kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Referensi

- Alawiyah, I. T. (2020). Praktik rentenirisasi perspektif ekonomi syariah dan sosiologi (studi di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah). *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v6i1.5309>
- Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam penanganan konflik sosial paska pilkada dalam mendukung ketahanan sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39–64. <https://doi.org/10.22146/jkn.61155>
- Avruch, K. (2022). Culture and Conflict Resolution. Dalam O. P. Richmond & G. Visoka (Ed.), *The Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies* (hlm. 254–259). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77954-2_67
- Azisi, A. M. (2021). Studi comparative teori konflik Johan Galtung dan Lewis A. Coser.. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.9178>
- Bercovitch, J. (2019). *Social Conflicts And Third Parties: Strategies Of Conflict Resolution*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429306259>
- Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314>
- Fatimah, D., & Nurhadi, Z. F. (2025). Peningkatan Literasi Jurnalistik melalui Pelatihan Penulisan Berita. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i3.3140>
- Fonseca, X., Lukosch, Stephan, & Brazier, F. (2019). Social cohesion revisited: A new definition and how to characterize it. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 32(2), 231–253. <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480>
- Izzudin, M., Jati, S. N., Mardiansyah, W., Aryansah, J. E., & R, F. (2022). Basic GIS training for upgrading local government spatial planning. *Community Empowerment*, 7(9), 1488–1493. <https://doi.org/10.31603/ce.7131>
- Jaya, U. I., & Delmiati, S. (2022). Koordinasi antara kepolisian dengan lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial tapal batas. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.261>
- Jones, L., Holland, R. A., Ball, J., Sykes, T., Taylor, G., Ingwall-King, L., Snaddon, J. L., & S.-H. Peh, K. (2020). A place-based participatory mapping approach for assessing cultural ecosystem services in urban green space. *People and Nature*, 2(1), 123–137. <https://doi.org/10.1002/pan3.10057>
- Leonardi, L. (2024). The Place of Disorder and the Transformation of Social Conflict. Dalam K. Berr, L. Koegst, & O. Kühne (Ed.), *Landscape Conflicts* (hlm. 57–68). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43352-9_4
- Lubis, D. M., Permana, D., & Nuradhawati, R. (2024). Strategi pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial untuk mewujudkan stabilitas wilayah (studi kasus di Kota Bandung). *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2953>
- Mahpudz, A. (2023). Pembelajaran Toleransi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural: Belajar dari Penyelesaian Konflik Sosial di Poso. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 10, 25–32. <https://doi.org/10.30595/pssh.v10i.663>
- Martin, S. R., & Côté, S. (2019). Social Class Transitioners: Their Cultural Abilities and Organizational Importance. *Academy of Management Review*, 44(3), 618–642. <https://doi.org/10.5465/amr.2017.0065>
- Mediawati, D. (2019). Konflik Antar Etnis Dan Upaya Penyelesaian Hukumnya. *Khazanah Hukum*, 1(1), 36–49. <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.14>
- Moniyana, R., & Pratama, A. D. (2021). Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i1.216>

- Musaffah, U., & Maharani, A. J. (2024). Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah). *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5702>
- Mustofa, I. (2018). Peran organisasi masyarakat dalam membangun harmoni pasca konflik antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang di Lampung Tengah. *Penamas*, 31(1), Article 1. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i1.150>
- Nugraha, S. T., Fauzi, L. M., & Kurnia, D. (2024). Sinergitas forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dalam mencegah konflik sosial di masa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2024. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2951>
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi komunikasi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2), Article 2. <http://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/4525>
- Pauzi, P., & Said, K. (2022). Pemetaan konflik sosial dan paham radikal sebagai suatu keniscayaan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau | *PERADA*. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/69>
- Pratiwi, A. D., Harahap, I., & Madhani, V. (2022). Konflik Dalam Masyarakat Global. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 80–88. <https://doi.org/10.51903/education.v2i2.141>
- Priambodo, A., Nur, A. A., Sandri, D., Ahmada, N. H., & Septiandiani, F. (2023). Pelatihan penggunaan software ArcGIS dan Avenza Maps dalam pengelolaan data spasial dan peta digital bagi perangkat desa di Kabupaten Purbalingga. *Abdimas Galuh*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i1.9824>
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Rahmanurwahidah, R., & Nurhadi, Z. F. (2024). Peningkatan Keterampilan Public speaking melalui Pelatihan Kader Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Cisarupan. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i2.3124>
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53–66. <https://doi.org/10.31947/jgov.v12i1.8018>
- Riwukore, J. R. (2022). Pelatihan: Evaluasi dan Rekonstruksi Kinerja ASN Pemerintah Kota Kupang Berbasis Sumber Daya Manusia. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i2.1472>
- Rusdi, M. (2021). Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.266>
- Sadewo, P. A., Sudjarwo, S., & Darsono, D. (2014). Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Sendangayu dan Surabaya Kecamatan Padangratu. *Jurnal Studi Sosial*, 2(4), 40981.
- Schlee, G. (2008). How Enemies Are Made: Towards a Theory of Ethnic and Religious Conflict. Dalam *How Enemies Are Made*. Berghahn Books. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9780857450609/html>
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. *Jurnal Academia Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.889>
- Sr, A. A. (2019). Transformasi konflik dan peran pemerintah daerah. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.609>
- Suhairi, As'ad, M., Khoirurrijal, & Mujib, A. (2020). *Konflik Sosial di Lampung Tengah: Akar Geneologis, Identitas Sosial, dan Penanganannya*. Pustaka Pranala.
- Suherman, A., & Sirajuddin, A. (2018). Kearifan lokal sebagai basis komunikasi pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial dan komunal. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 34–42. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.152>

- Sumartono, S. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36914/jikb.v5i1>
- Sumaya, F. (2020). Identitas dalam konflik di Kalimantan Barat (sebuah pemetaan konflik). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 86–92. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28149>
- Susetyo, S., Ikram, I., & Damayantie, A. (2022). Pendekatan sistemik untuk analisis dan transformasi konflik: studi kasus konflik sosial di Desa Balinuraga. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i1.247>
- Widiya, A., Hartati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). Pelatihan kepada Masyarakat dalam Menjaga Makna Kearifan Lokal, Nilai Sejarah, dan Adat Khas Tradisional Masyarakat Melayu Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.224>
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>